

CERTIFICATE OF ORIGINALITY

To Whom It May Concern:

This is to certify that the following document has been checked for originality with premium plagiarism checker. The result is as follows:

Originality Report	
Document Title	Guru Dalam Pusaran Politik Di Daerah (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)
Author(s)	Yulianto Kadji
Similarity Found	9%
Statistics	236 words Plagiarized / 2590 Total words
Remark(s)	Low Plagiarism Detected
Internet Sources	
<1% - repository.ung.ac.id/hasilriset/show/4/33/guru-dalam... <1% - www.scribd.com/doc/267949406/Demokrasi-Lokal... 1% - docplayer.info/67611630-Konvensi-nasional... <1% - indomakalah.blogspot.com/2009/12/hakikat-profesi.html 1% - pendidikan, ini artinya proses humanisasi dan dehumanisasi memiliki fungsi yang saling bertolakbelakang . 1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/12/manajemen-mutu... <1% - www.eurekapedidikan.com/2017/06/kompetensi... 1% - student.cnnindonesia.com/edukasi/20161114103402... 1% - penilaian-kinerja-guru.blogspot.com <1% - yandisupran1990.blogspot.com/2012/04/guru-profesional.html 1% - outlinepustaka.blogspot.com/2015/07/makalah-akhlak... 1% - www.academia.edu/21085739/Guru_Sebagai_Model <1% - refdak.wordpress.com/category/mengawal-generasi...	

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Date: Friday, September 28, 2018



Novriyanto Napu, M.AppLing., Ph.D.
Director

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

Jl. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Originality Report

Similarity Found: 9%

Date: Friday, September 28, 2018

Statistics: 236 words Plagiarized / 2590 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

GURU DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo) Oleh : Yulianto Kadji Program Doktor Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo e-mail : yk@ung.ac.id Abstrak Keterlibatan guru dalam dinamika politik di daerah tak dapat dielakkan. Komunitas guru bahkan menjadi sasaran empuk Kepala Daerah sebagai Incumbent pada Pilkada atau keluargairdan kroninya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dengan berbagai cara yang dilakukan, terkadang Guru tidak bisa menghindari kecuali itu harus terlibat dan melibatkan diri agar tidak menjadi sasaran kebijakan mutasi dari sang Kepala Daerah. Kegiatan politik sesaat inilah yang menyebabkan terbaikannya posisi Guru yang hakikatnya berperan sebagai pendidik, pengajar. Jika hal tersebut benar adanya, hal ini menandakan bahwa Guru ikut terseret arus pusaran politik di daerah.

Kata Kunci : Guru dan Politik

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu poin yang diotonomi-daerahkan sejak Reformasi bergulir di tahun 1998 yang ditandai dengan deklarasi serta implementasi Otonomi Daerah (UU No. 22 / 1999, UU No. 32 / 2004, dan UU No. 23 / 2014) adalah Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk Pembinaan Guru.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas politik daerah dengan pelaksanaan Pilkada langsung merupakan hal yang paling mencolok dalam geliat dan hiruk pikuk otonomi daerah. Akibatnya, komunitas guru, yang sejak Otonomi Daerah berada dalam kendali Pemerintah Daerah, menjadi salah satu target politik. Politik praktis menjelang, saat dan setelah Pilkada menjadikan Guru sebegitu mudahnya dijadikan komoditas politik yang “gratis”, seolah tak pernah ada lagi lembaga atau organisasi profesi Guru, semisal PGRI yang tidak dapat berbuat banyak untuk menyelematkan profesi Guru dari pusaran kepentingan politik, dan lebih aneh lagi justru organisasi profesi (PGRI) terkesan mengarahkan para Guru pada pilihan tertentu, ketika ada diantara para kandidat yang berasal dari kalangan Guru.

Fenomena inilah yang menarik bagi penulis untuk menganalisisnya lewat tulisan yang berjudul : “GURU **DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo)**” Fokus Masalah Berdasarkan uraian di atas, fokus masalah penelitian adalah sebagai berikut: _Bagaimana pelibatan Guru dalam politik praktis pada Pilkada Bagaimana solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada Tujuan Tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan model pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada Mendeskripsikan solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada **PENDIDIKAN, GURU DAN POLITIK Tidak dapat dipungkiri sejak berlakunya otonomi daerah dan dilaksanakannya **Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung**** mempengaruhi sistem pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat penyerahan kewenangan atau desentralisasi pembinaan Guru dari Pendidikan Dasar sampai ke tingkat SMA/SMK, padahal disisi lain bahwa masalah pendidikan adalah masalah nasional dan menjadi tugas negara dalam memperhatikan segala bentuk dan kompleksitas masalahnya.

Sering dengan itu, maka relevan apa yang ditegaskan oleh Maksum, dkk (2004 : 221) bahwa : “Saat ini pendidikan dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks dan sangat luar biasa, namun semua negara – tanpa kecuali - mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang paling penting”. Mengertinya bahwa dunia pendidikan menjadi hal penting dan utama bagi negara untuk harus dimanajementi dengan baik

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



oleh Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam perspektif lain keberadaan Guru dan organisasi profesi Guru (PGRI) juga menjadi sorotan

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 _

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

dalam hal tugas dan profesionalismenya, sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2002 : 93): "Merosotnya profesi guru lebih dikarenakan lembaga organisasi profesi guru sangat lemah sehingga tidak menopang perbaikan profesi guru, baik dari segi kualitas pengabdian maupun di dalam kualitas penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap profesi tersebut."

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi profesi Guru dalam eksistensinya sangat dibutuhkan oleh Guru, yang memang selama ini diperankan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), akan tetapi PGRI pun tidak bisa mengakomodir kepentingan Guru dalam jabatan guru sebagai profesi. Sementara itu dalam dimensi lain berbicara tentang eksistensi Sekolah yang dalam prakteknya tidak luput dari sentuhan-sentuhan kepentingan kekuasaan, sebagaimana diketengahkan oleh Maksum, dkk (2004:173) bahwa : "Sekolah telah menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena kehadirannya dalam jagad praktis bisa digunakan untuk membahasakan kepentingan-kepentingan dan ideologi-ideologi yang dominan. Dengan sekolah, manusia dapat meluruskan dan memuluskan cita-cita kekuasaannya."

Pada bagian lain Maksum, dkk (2004:175 menyatakan bahwa : "Jargon netralitas pendidikan justru membawa peran antagonistik antara pendidikan humanis dan dehumanisasi pendidikan, ini artinya proses humanisasi dan dehumanisasi memiliki fungsi yang saling bertolak belakang". Dengan fakta itulah, sekiranya relevan dengan pandangan Paulo Freire (2002:180), bahwa : "Mari kita beranjak dari proses pemberantasan buta huruf yang membelenggu menuju diskusi beberapa gagasan tentang yang seharusnya dilaksanakan oleh sekolah secara kritis, yakni mengenai peran pendidikan dalam mendomestifikasi kenyataan dapat membantu guru dan siswa menyelesaikan isu buta huruf politik".

Dalam pandangan ini bukan berarti mengarahkan Sekolah akan dijadikan tempat praktek politik, tetapi sesungguhnya diharapkan bahwa Sekolah tidak dibutakan oleh permasalahan politik yang terkadang memberangus kepentingan sosial sekolah dalam mendidik anak-anak generasi bangsa pemilik masa depan yang lebih baik. Guru berkarakter adalah mereka yang senang dengan profesinya. Kesadaran akan tugasnya melampaui seorang profesional.

Mereka bertekad berupaya sungguh-sungguh untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendidik yang menentukan masa depan bangsa, yakni anak-anak sebagai generasi penerus negara (Suharsaputra, 2013 : 17 – 18) Dalam konteks tersebut, menjadi

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Guru Profesional menurut Suyanto, dkk (2013:5) setidaknya memiliki standar minimal: _Memiliki kemampuan intelektual yang baik; Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional; Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif; Memahami konsep perkembangan psikologi anak; Memiliki kemampuan mengorganisasi proses belajar; dan Memiliki kreativitas dan seni mendidik.

Masih menurut Suyanto, dkk (2013:6) yang menegaskan bahwa : "Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru dituntut agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara professional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, merdeka (bebas dari tekanan pihak luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap memberikan pelayanan prima berdasarkan pada kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan professional, pengakuan masyarakat dan kode etik.

Selain itu, guru professional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan. Pertama, kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kedua ,kemampuan afektif, di mana guru dituntut berakhlak luhur, dan mampu menjaga perilakunya agar menjadi model yang baik oleh siswanya.

Ketiga, kemampuan psikomotorik, berarti guru harus berpengetahuan luas dan mampu mengimplementasikan ilmu mereka dalam kehidupan sehari-hari". Dalam pandangan tersebut menempatkan guru benar-benar sebagai elemen yang sangat menentukan dalam membawa generasi muda bangsa yang lebih memahami makna masa depan bangsa menjadi milik generasi muda dimasa yang akan datang.

Maka, wajar guru menjadi peletak dasar generasi muda bangsa dalam berperilaku dan berkarakter baik, memiliki kecerdasan intelektual yang handal serta memiliki keahlian dan ketrampilan yang dapat diandalkan menuju pada kemandirian bangsa. Dalam perspektif lain Suharsaputra (2013:1- 2) mengemukakan bahwa: "Menjadi Guru sepatutnya adalah panggilan jiwa harus terus dijaga, terlepas dari kapan kesadaran tersebut muncul. Beberapa orang sejak kecil memiliki impian menjadi guru. Menjadi guru memang tidak sulit, namun tidak juga mudah.

Banyak hal yang dituntut, tapi banyak juga yang dapat diterima, akan tetapi semua itu akan menjadi amat dangkal jika hanya aspek reward menjadi pertimbangan utama yang diperhitungkan akan apa yang diterima. Guru seharusnya lebih dari itu, mampu melampauinya, karena jika demikian maka komparasi reward akan dapat dengan mudah

TRANSBahasa

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



mnggoyahkan dan mengganggu, sehingga kesadaran akan panggilan menjadi tak punya makna dalam

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 _

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

memperkuat dorongan serta keterlibatan secara tulus pada dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru mampu dan harus mampu mengatasinya”.

Menjadi guru yang baik dan professional tidak semata-mata mengharapkan reward atau penghargaan yang berlebih-lebihan, tapi paling tidak ketika guru telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, maka reward dan penghargaan akan menyertai upaya guru yang menjunjung tinggi profesionalitas. PEMBAHASAN Model Pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada Ujung tombak penanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan pasti Guru, disamping faktor-faktor lain sebagai penunjang terhadap pencapaian mutu pendidikan tersebut.

Namun kita tidak bisa pungkiri seiring dengan perjalanan waktu sejak era reformasi dan bergulirnya implementasi desentralisasi otonomi daerah sejak UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sepenuhnya satu diantaranya adalah pembinaan guru pendidikan dasar dan menengah.

Bersamaan dengan desentralisasi otonomi daerah, Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung digelar dan inilah dipastikan seluruh elemen dan komunitas rakyat dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda, termasuk organisasi dan profesi Guru. Berikut dapat disebutkan beberapa cara pelibatan Kepala Sekolah dan Guru dalam politik praktis menjelang Pilkada, antara lain: Penunjukan Kepala Sekolah sebagai Pembina Kelurahan Beberapa Kepala Sekolah di Gorontalo sempat diwawancarai yang intinya mengatakan bahwa : “Kami Kepala Sekolah ditunjuk sebagai Pembina Kelurahan, dengan alasan bahwa keberadaan Kepala Sekolah di Kelurahan paling tidak akan mempengaruhi secara fsi kologis warga masyarakat termasuk Guru-guru yang di Kelurahan tersebut, dan memastikan pilihan mereka pada figur tertentu yang perintahkan oleh atasan bahkan Kepala Daerah dalam forum-forum resmi”.

Penunjukan Pengawas Sekolah sebagai penanggungjawab kecamatan Para pengawas sekolah dijadikan tameng oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan mengarahkan komunitas Guru untuk memilih calon tertentu. Bahkan Pimpinan SKPD ada yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu dan mengarahkan para Guru untuk harus mendukung pasangan calon tersebut.

_Pelibatan Guru dalam beberapa kegiatan politik praktis Guru dipandang sebagai

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

komunitas yang paling mudah untuk di mobilisir pada kegiatan yang menguntungkan pihak atau calon tertentu. Terkadang ada kegiatan yang dilaksanakan tidak seperti biasa, bahkan tidak pernah ada selama ini, tapi tiba-tiba muncul berbagai kegiatan menjelang pelaksanaan Pilkada, dan otomatis melibatkan Guru yang begitu mudahnya untuk di mobilisir.

Beberapa Guru yang sempat diwawancarai mengatakan bahwa : “Kami para Guru tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ikut saja perintah atasan, berhubungan dengan siapa yang akan dipilih dalam Pilkada”. Modus lainnya dalam mempolitikasi Guru dan Pendidikan pada Pilkada, antara lain : Frekwensi pertemuan Guru dengan Kepala Daerah (Incumbent); Hampir di setiap acara para Guru dijadikan sebagai momentum sosialisasi Incumbent atau yang didukung oleh organisasi Guru (PGRI); Menggunakan dana BOS untuk pembuatan spanduk, pamflet-pamflet untuk sosialisasi Incumbent.

Klaim program pendidikan sebagai program utama Incumbent; Mobilisasi dukungan melalui Kepala Dinas Pendidikan; Janji promosi jabatan kepada para Guru. Janji peningkatan kesejahteraan kepada para Guru. Paling tidak ada tiga alasan mengapa Guru lebih mudah untuk di libatkan langsung dalam Pilkada : Guru berperan dalam bidang yang strategis, yakni pendidikan yang bersentuhan langsung dengan publik; Dalam kekuasaan otonomi daerah, guru lebih mudah untuk dipengaruhi melalui sistem birokrasi dengan menggunakan tangan Kepala Dinas Pendidikan; Komunitas guru masih dipandang sebagai tokoh masyarakat yang begitu mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dipengaruhinya memilih pasangan calon tertentu dalam Pilkada.

Jika ternyata ada Kepala Dinas, Kepala Sekolah atau Guru yang membangkang dari perintah sang Incumbent, maka yang terjadi antara lain: Kepala Dinas dan Kepala Sekolah pasti non job Guru dimutasi ke daerah terpencil; Guru dimutasi menjadi anggota Satpol PP, atau ke unit kerja yang tidak sesuai kompetensi Guru. Berbagai pelanggaran dan modus pelibatan Guru dalam Politik Pilkada yang selama ini terjadi jarang mendapat perhatian serius, sehingga sulit untuk di proses dalam kerangka penegakkan hukum Pilkada.

Dan kondisi inilah yang menguntungkan

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 _

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Calon Kepala Daerah Incumbent atau keluarga dan kroninya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, karena adanya kemudahan dan fasilitas yang memungkinkan calon bersangkutan memanfaatkan kekuasaannya untuk merusak netralitas dan independensi Guru.

Solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada Membumikan kembali peran Guru Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan formal. Selanjutnya disebutkan pula bahwa tugas profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang menjadi sumber penghasilan seseorang dan.

Pekerjaan sebagai guru yang menuntut keahlian, yang sesuai dengan standar mutu atau norma tertentu; seorang guru juga harus melewati pendidikan profesi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Profesionalisme dalam pendidikan mengindikasikan seseorang yang bekerja sebagai guru dituntut memiliki intuisi pendidik, mereka mampu memahami peserta didik. Guru juga harus memiliki keahlian minimal pada satu disiplin ilmu secara mendalam. Sikap integritas profesional harus dimiliki seorang guru. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berkenaan dengan peran Guru, paling tidak seorang Guru harus menyadari untuk memahami perannya sebagai :
1) Pendidik, 2) Pengajar, Pembimbing, 4) Pelatih, 5) Penasehat, 6) Pembaharu (Inovator), 7) Model dan Teladan, 8) Pribadi, 9) Peneliti, 10) Pendorong Kreatifitas, 11) Pembangkit Pandangan, 12) Pekerja Rutin, 13) Evaluator, 14) Fasilitator, 15) Dinamisator.

Disamping peran Guru tersebut, maka yang patut juga diketahui adalah masalah yang melingkupi Guru di Indonesia, antara lain: Menurut data UNESCO 2011, Indonesia

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

memiliki lebih lebih dari 3,4 juta guru. _Akan tetapi, data Kemendikbud melaporkan bahwa tidak semua guru memiliki sertifikasi (hanya 16,9 persen atau 575 ribu guru yang sudah tersertifikasi).

Pendataan guru yang belum maksimal sehingga menghambat identifikasi supply and demand. Penyebaran guru yang belum merata. Besarnya presentasi jumlah guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV (63,1%). Banyak guru berkompentensi rendah. Program peningkatan kompetensi tidak sepenuhnya terdistribusi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga guru dituntut memiliki kompetensi (ICT).

Pada tahun 2010 s/d 2015 guru pensiun ± 300.000 orang dan beum sepenuhnya tergantikan, sementara tidak sedikit Guru yang di mutasi dan pindah ke struktural atau staf SKPD. Desentralisasi pengelolaan guru selama ini, jika terdapat kasus-kasus guru yang menimpah para Guru selalu dikirim ke pusat untuk menyelesaikannya.

Berikut yang tidak kalah menariknya tentang masalah yang mendera Guru di Indonesia: Masalah Kualitas Guru Seorang guru (khususnya SD), mengajar lebih dari satu mata pelajaran (guru kelas), hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak sesuai harapan. Jumlah Guru Yang Masih Kurang Jumlah guru di Indonesia dinilai kurang seimbang, yang pada kenyataannya masih ada satu kelas lebih dari 30 anak didik.

Jumlah siswa demikian dinilai kurang efektif, sebab kelas ideal hanya terdiri dari 15- 20 anak didik. Hal ini disebabkan oleh jumlah guru yang sedikit. Masalah Distribusi Guru Penyebaran dan distribusi Guru belum merata, bahkan ada Sekolah yang berlebihan ada juga yang kekurangan Guru, terkadang hal itu terjadi atau sebagai dampak kebijakan Kepala Daerah sebelum dan sesudah Pilkada, bahkan Guru dimutasi pada unit kerja yang tidak sesuai komptensi Guru itu sendiri.

Masalah Kesejahteraan Guru Walaupun Guru sudah memperoleh Tunjangan Profesi, tapi kadang dipandang belum sesuai dengan beban kerja seorang Guru, belum lagi pembayarannya tidak tepat waktu.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 _

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

3.2.1. Solusi Dari Permasalahan Guru Di Daerah Berorientasi dari permasalahan Guru yang dideskripsikan diatas, maka dapat disampaikan beberapa solusi sebagai berikut: Pembinaan/Pengelolaan dan Tata Kelola Manajemen Guru sebaiknya dikembalikan ke Pemerintah Pusat, saat ini tengah diserahkan pembinaan Guru SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi yang justru tdak lebih terarah lagi, hanyalah memindahkan masalah di kabupaten/kota ke tingkat Provinsi, perlakuan kepada Guru sama saja; Penguatan kapasitas kualitas dan kompetensi guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk pemberian kesempatan bagi Guru untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang Strata Tiga (Doktor) atas biaya Pemerintah Pusat, sebagaimana selama ini berlaku bagi Dosen Perguruan Tinggi.

Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, agar dalam membentuk peraturan yang mengatur tentang Sistem Pendidikan, Kurikulum dan pembinaan Guru harus lebih konkrit dan substansial agar tidak terjadi Ganti Menteri Ganti Kebijakan, Ganti Dirjen Ganti Juklak. Peraturan tentang Beban Kerja Guru harus lebih proporsional dan profesional dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

PENUTUP Sudah saatnya Pemerintah Pusat mereview kembali tentang berbagai peraturan yang berpihak kepada kepentingan Guru, baik masalah kesejahteraan khususnya pembayaran Tunjangan Profesi Guru jika belum bisa ditingkatkan minimal pembayarannya tepat waktu, peningkatan kapasitas keilmuan dan skills, kurikulum yang dijalankan oleh _Guru tidak selalu berubah-ubah, pembinaan langsung oleh Pemerintah Pusat agar Guru tidak dijadikan komoditas politik saat Pilkada oleh Pemerintah Daerah.

Menjadikan Guru benar-benar sebagai komponen bangsa yang selalu siap merubah generasi muda bangsa menjadi generasi yang berkapasitas dan bertanggungjawab bagi kelangsungan **negara kesatuan Republik Indonesia di masa depan.**

INTERNET SOURCES:

<1% - repository.ung.ac.id/hasilriset/show/4/33/guru-dalam...

<1% - www.scribd.com/doc/267949406/Demokrasi-Lokal...

1% - docplayer.info/67611630-Konvensi-nasional...

<1% - indomakalah.blogspot.com/2009/12/hakikat-profesi.html

1% - pendidikan, ini artinya proses humanisasi dan dehumanisasi memiliki fungsi yang saling bertolakbelakang .

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/12/manajemen-mutu...
<1% - www.eurekapedidikan.com/2017/06/kompetensi...
1% - student.cnnindonesia.com/edukasi/20161114103402...
1% - penilaian-kinerja-guru.blogspot.com
<1% - yandisupran1990.blogspot.com/2012/04/guru-profesional.html
1% - outlinepustaka.blogspot.com/2015/07/makalah-akhlak...
1% - www.academia.edu/21085739/Guru_Sebagai_Model
<1% - refdak.wordpress.com/category/mengawal-generasi...
<1% - bagusbudhiarti.blogspot.com/...permasalahan-guru-di_7.html

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id